

Judul : Batalkan Pemekaran Papua
Tanggal : Rabu, 27 April 2022
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

EDITORIAL

Batalkan Pemekaran Papua

Pemekaran Papua bukan solusi. Fakta dan data menunjukkan pemekaran wilayah membuat chaos daerah baru.
EDISI, 27 APRIL 2022

f t i +



Ilustrasi: Tempo/Kuswoyo

- Pemerintah perlu menindaklanjuti aspirasi Majelis Rakyat Papua yang menolak pemekaran wilayah.
- Penambahan provinsi baru belum melibatkan penduduk setempat.
- Akan lebih terlihat konkret kalau pemerintah memprioritaskan pembentukan sejumlah institusi yang diamanatkan UU Otsus, seperti pengadilan hak asasi manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Hukum Ad Hoc, dan peradilan adat.

IDE [pemekaran Papua](#) kembali menunjukkan tabiat Jakarta yang suka memaksakan kehendak. Alih-alih mendengarkan aspirasi orang Papua untuk segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup dan masa depan mereka, para pejabat pemerintah pusat giat melobi sana-sini untuk mengegolkan rencana itu tanpa mengajak bicara Majelis Rakyat Papua.

Majelis ini mewakili masyarakat adat dan kultural Papua. Penambahan provinsi secara tidak partisipatif seperti ini kembali akan memicu konflik yang tak berkesudahan di Bumi Cenderawasih. Pengalaman panjang konflik rupanya tak kunjung membuat insaf politikus Jakarta.



Lagi pula, memecah wilayah Papua akan dibaca sebagai strategi Jakarta mengkotak-kotakkan orang Papua ke dalam wadah yang lebih kecil. Dengan begitu, Jakarta akan dengan mudah mengontrolnya. Pandangan seperti ini akan kian kuat, mengingat gagasan ini digadang-gadang ke DPR melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemekaran Wilayah Papua tanpa partisipasi orang Papua sendiri.

Ada tiga provinsi baru di Papua yang disahkan melalui beleid berbeda-beda pada 12 April 2022: Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. DPR mendaku rancangan ini sebagai inisiatif mereka. Tak cukup hanya itu, pemerintah hendak menambah dua provinsi lagi dalam wadah tujuh wilayah adat.

Berbeda dengan pemerintah ataupun DPR, MRP mencium adanya kepentingan lain di luar soal efektivitas pemerintahan seperti dalih Jakarta. Menurut MRP, dalam amar gugatan UU [Otonomi Khusus Papua](#) ke Mahkamah Konstitusi, pemecahan kian mempersempit hak orang Papua menentukan nasib sendiri.

Argumen MRP secara konstitusi juga kuat. Mereka menggugat Pasal 76 UU Otonomi Khusus yang menyebutkan pembentukan provinsi baru di Papua boleh melangkahi daerah persiapan. Padahal tahapan daerah persiapan ini wajib ada seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri juga menguatkan argumen MRP bahwa 80 persen dari 223 daerah otonom baru yang dibentuk sejak 2009 hingga 2014



gagal berkembang. Ratusan daerah baru itu tetap menggantungkan anggaran ke pusat. Itu pula sebabnya, pemerintah memberlakukan moratorium pemekaran wilayah. Jika kini Papua akan dimekarkan, pemerintah seperti menjilat ludah sendiri.

Pemecahan Papua menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat juga menjadi bukti bahwa pemekaran bukan solusi. Pendapatan asli daerah dua provinsi kaya sumber daya alam ini masih jauh di bawah 30 persen pada 2021. Papua Barat bahkan tak kunjung beranjak dari daftar terbawah wilayah termiskin di Tanah Air.

Jauh sebelum pemekaran, otonomi khusus Papua juga gagal menjadi solusi problem pulau ini. Apa sebabnya? Kebijakan datang dari atas. Orang Papua hanya diminta menerima kebijakan Jakarta tanpa bisa menampiknya. Kajian Universitas Cenderawasih pada 2010 tentang otonomi khusus menyimpulkan kegagalan otonomi khusus akibat tumpang tindih aturan hukum melalui peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi.

Alih-alih bernafsu memecah Papua ke dalam wilayah kecil, Jakarta mesti memenuhi kewajiban yang diamanatkan otonomi khusus, seperti membentuk pengadilan hak asasi manusia, mendirikan komisi rekonsiliasi, hingga membuat peradilan adat untuk mengurai masalah-masalah pelik di provinsi itu.

Dengan pelbagai data, fakta, dan sejarah itu, pemekaran Papua jelas bukan solusi. Apalagi jika argumen pemerintah bertumpu pada soal keamanan. Justru munculnya kelompok-kelompok bersenjata di Papua terjadi akibat Jakarta selalu salah mendiagnosis problem di sana. Maka, untuk tahu diagnosis dan menentukan obat yang tepat, tiada lain hanya dengan bertanya lebih dulu kepada orang Papua sendiri.

[#Konflik di Papua](#)

[#Otonomi Khusus Papua](#)

[#Konflik Papua](#)

[#Pemekaran Papua](#)